

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) menyampaikan jika kontrak yang terjadi diantara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan disebut sebagai *agency theory*. Pemilik perusahaan bertugas untuk menyediakan dana bagi perusahaan sedangkan manajemen bertugas untuk mengelola dan mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan (Lambert, 2006). Sebagai entitas yang melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasional perusahaan *agent* tentu memperoleh lebih banyak informasi dibandingkan *principal* terkait situasi dan gambaran perusahaan (Indrasari & Aris, 2023). Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik kepentingan (Wati & Gultom, 2022).

Bendickson *et al.* (2016) menyebutkan bahwa konflik kepentingan merupakan fokus dari *agency theory*. Konflik kepentingan yang timbul diantara pengelola dengan pemegang saham suatu perusahaan akan memicu timbulnya tindakan oportunistik (Kusuma & Mertha, 2021). Dewi & Rahayuningsih (2023) menyebutkan bahwa konflik kepentingan tersebut akan menginsentivasi manajer untuk melakukan *earnings management*. Manajer akan meningkatkan laba pada perusahaan, sehingga manajer dapat meningkatkan kompensasi yang diterimanya melalui bonus yang lebih tinggi (Jones, 1991). Hal tersebut tentu dilakukan untuk kepentingan manajer sendiri dengan mengorbankan kepentingan para investor (Sun & Liu, 2016). Tindakan manajer tersebut tentu sangat merugikan para investor dan juga akan berdampak terhadap isi yang tersaji pada laporan keuangan karena tidak merefleksikan situasi perusahaan (Rinta, 2021). Hal tersebut diperkuat oleh Pham *et al.* (2017) yang menyatakan konflik kepentingan akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dari itu diperlukan metode akuntansi yang mampu dijadikan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan

kepentingan manajemen dengan pemilik perusahaan (Nazilah & Syaiful, 2023).

Penerapan *accounting conservatism* dapat mengatasi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen (Hajawiyah *et al.*, 2020). Karena implementasi *accounting conservatism* merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pembatasan terhadap tindakan oportunistik manajemen untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan manajemen laba (Zhong & Li, 2017). Watts (2003) juga menyatakan bahwa prinsip *accounting conservatism* merupakan mekanisme tata kelola (*corporate governance*) yang penting dalam menurunkan biaya agensi dan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen serta mampu mengatasi asimetris informasi diantara manajer dan investor perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Hejranijamil *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa tindakan oportunistik manajemen dapat ditekan dengan mengimplementasikan *accounting conservatism* saat menyajikan laporan keuangan.

2.1.2 *Positive Accounting Theory*

Positive accounting theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Watts & Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini menjelaskan bahwa ketika perusahaan ingin memberikan nilai tambah kepada para investor, perusahaan dapat membuat kebijakan tertentu yang dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan (Noviyanti & Agustina, 2021). Demski (1988) menyebutkan bahwa fokus dari *positive accounting theory* sendiri terletak pada pemilihan metode akuntansi yang digunakan pada suatu perusahaan. Pernyataan tersebut relevan dengan Priyono & Suhartini (2022) yang mengungkapkan jika pusat *positive accounting theory* terletak pada kebebasan manajer dalam menentukan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan pada saat penyajian laporan keuangan dengan mempertimbangkan ketidakpastian di masa yang mendatang. Fleksibilitas manajer dalam menentukan prinsip akuntansi mampu memicu timbulnya tindakan oportunistik (Wiecandy &

Khairunnisa, 2020). Hal ini terdapat dalam *positive accounting theory* yang menerangkan jika alasan sebenarnya pihak manajemen dalam menentukan metode akuntansi bukan didasarkan pada kepentingan perusahaan namun berdasarkan pada tujuan pribadi (Watts & Zimmerman, 1990).

Noviyanti & Agustina (2021) menjelaskan bahwa *positive accounting theory* mencoba menjelaskan tingkah laku manajer perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Berlianti *et al.* (2022) menerangkan jika pada *positive accounting theory* ada dua perspektif yang mendorong manajer untuk melakukan sebuah tindakan, yakni perspektif efisiensi (*ex ante*) dan perspektif oportunistik (*ex post*). Perspektif efisiensi diartikan sebagai cara – cara yang ditujukan untuk meminimalkan *agency cost* sedangkan perspektif oportunistik merupakan langkah yang digunakan manajemen untuk memaksimalkan laba melalui pemilihan metode akuntansi tertentu untuk kepentingan pribadinya (Yisha, 2020). Sehingga manajer dapat menentukan prinsip akuntansi yang relevan dengan ambisi mereka (W. P. Sari, 2020). Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan terhadap laba yang dihasilkan (Tazkiya & Sulastiningsih, 2020).

Watts & Zimmerman (1990) menyebutkan jika terdapat tiga hipotesis pada *positive accounting theory* yang mendorong manajemen dalam melakukan pemilihan terhadap metode akuntansi yang ingin diterapkan yakni :

1. *Bonus Plan Hypothesis* (Hipotesis Rencana Bonus)

Dalam *bonus plan hypothesis* manajemen akan berupaya untuk memperbesar laba yang dilaporkan sehingga berdampak terhadap kinerja manajemen yang meningkat dan manajer akan mendapatkan bonus yang sangat tinggi sebagai bentuk apresiasi dari para pemegang saham.

2. *Debt Covenant Hypothesis* (Hipotesis Kontrak Hutang)

Saat perusahaan memiliki kemungkinan yang besar dalam melanggar *debt covenant*, perusahaan akan menggunakan metode

akuntansi yang mampu mengakui pendapatan pada periode mendatang ke dalam periode berjalan. Hal tersebut bertujuan agar laba menjadi besar sehingga akan berdampak terhadap peningkatan aset dan ekuitas perusahaan. Hal tersebut membuat tingkat *leverage* perusahaan menjadi rendah dan menjauhkan perusahaan dari pelanggaran kontrak.

3. *Political Cost Hypothesis* (Hipotesis Biaya Politis)

Dalam *political cost hypothesis* manajer akan terdorong untuk menggunakan metode akuntansi yang mampu menanggihkan pengakuan pendapatan. Tindakan tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk memperkecil *net income* yang diperoleh sehingga tanggungan terhadap *political cost* dapat ditekan.

2.1.3 *Accounting Conservatism*

Accounting conservatism termasuk salah satu ciri laporan keuangan yang telah diterapkan sejak lama dan menjadi salah satu ciri penting kualitas informasi keuangan (Arthasari & Dwiati, 2022). Syahputri & Nawirah (2023) mendefinisikan *accounting conservatism* sebagai prinsip yang secara hati-hati mengakui dan mengukur aset serta laba perusahaan dikarenakan kondisi ekonomi yang senantiasa dikelilingi oleh ketidakpastian. Dengan menggunakan prinsip ini perusahaan akan mengakui kerugian atau biaya terlebih dahulu karena kemungkinan besar akan terjadi dan menunda pendapatan sampai benar-benar dapat direalisasi (Nazilah & Syaiful, 2023). Prinsip ini akan mencegah *overstate* yang terjadi pada pendapatan dan laba perusahaan (Efendi & Handayani, 2021). Maka dapat disimpulkan prinsip ini lebih mengantisipasi kerugian dibandingkan dengan pendapatan (Rivandi & Ariska, 2019).

Penerapan *accounting conservatism* sebagai prinsip dalam penyusunan laporan keuangan masih menuai pro dan kontra (Kristina & Yuniarta, 2021). Dalam penyajian laporan keuangan perusahaan menganggap bahwa penerapan *accounting conservatism* dapat menjadi kendala (Solichah & Fachrurrozie, 2019). Hal ini dikarenakan laporan

keuangan yang tersaji akan menjadi bias akibat imbas dari penerapan *accounting conservatism* (Efendi & Handayani, 2021). Padahal jika diterapkan dengan tepat, *accounting conservatism* akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih berkualitas dan lebih baik (Tumpal Manik, 2018). Hal tersebut juga dipertegas lewat pernyataan Sulastri & Anna (2018) yang mengatakan bahwa *accounting conservatism* tidak bisa dipergunakan dengan berlebihan sebab mampu mempengaruhi kalkulasi laba dan kerugian serta membuat laporan keuangan yang tersaji tidak merefleksikan situasi perusahaan secara akurat. Walaupun masih terdapat pro dan kontra dalam penerapannya, masih banyak entitas bisnis yang menggunakan *accounting conservatism* saat menyusun laporan keuangan (Syifa *et al.*, 2017).

Penerapan *accounting conservatism* tidak dapat dikesampingkan dalam pembuatan laporan keuangan (Zhong & Li, 2017). Hal ini dikarenakan manajer selaku pembuat laporan keuangan sering kali menyalahgunakan kebijakannya untuk memanipulasi laporan keuangan (Priyono & Suhartini, 2022). Selain itu, manajemen sering kali terlalu optimis dalam mengakui pendapatan (Reskino & Vemiliyarni, 2014). Tindakan tersebut akan menimbulkan penyajian laba yang *overstate* sehingga berdampak terhadap informasi yang diberikan karena tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya pada perusahaan (Zulni & Taqwa, 2023). Ditambah dengan ketidakpastian ekonomi dimasa depan membuat perusahaan harus lebih hati-hati untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi (Meilinda *et al.*, 2022). Oleh karena itu, Lubis *et al.* (2022) menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Sebab, *accounting conservatism* mampu menghindari optimisme berlebihan pihak pengelola dan para pemangku kepentingan (Darmayanti *et al.*, 2022). Gao (2013) juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disajikan akan cenderung netral dan terhindar dari oportunistik manajemen ketika perusahaan menggunakan *accounting conservatism* saat menyusun laporan keuangan. Selain itu penerapan *accounting conservatism* dalam pelaporan keuangan dapat memitigasi

risiko manajer melakukan manipulasi (Wardhani & Isnalita, 2019). Kemudian dipertegas kembali oleh Hejranijamil *et al.* (2020) bahwa selain mampu menjadi pelindung kepentingan pemegang saham, penerapan *accounting conservatism* juga mampu membantu manajer dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis.

Watts (2003) menyebutkan bahwa terdapat beberapa model dalam mengukur *accounting conservatism* yang terbagi menjadi tiga cara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Stock Return Relation Measure*

Dalam metode ini Basu (1997) menyebutkan bahwa penerapan *accounting conservatism* membuat laba yang dihasilkan perusahaan lebih konservatif karena perusahaan cenderung mengakui berita buruk terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan menggunakan prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan maka perusahaan akan mengakui kerugian terlebih dahulu dan menunda pengakuan pendapatan (Hejranijamil *et al.*, 2020).

$$NI_t = \beta_0 + \beta_1 NEG_t + \beta_2 RET_t + \beta_3 NEG_t RET_t + \varepsilon_t$$

Keterangan :

NI : Laba per lembar saham

NEG : Variabel *dummy* dimana jika *return* negatif (1), jika *return* positif (0)

RET : *Return* saham perusahaan

β : Slope regresi

β_3 : Perusahaan menerapkan *accounting conservatism* jika memiliki tanda positif (+)

2. *Net Assets Measure*

Muhardi (2013) menyebutkan bahwa *accounting conservatism* dapat diukur menggunakan MTB (*Market to Book Ratio*) dengan melakukan perbandingan terhadap harga pasar saham dan nilai buku saham yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Market to Book Ratio} = \frac{\text{Market Value of Shares}}{\text{Book Value of Shares}}$$

3. *Accrual Measure*

Givoly & Hayn (2000) menyebutkan bahwa penerapan *accounting conservatism* yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan akrual negatif. Ketika semakin tinggi akrual negatif yang dihasilkan maka implementasi *accounting conservatism* pada perusahaan tersebut juga semakin tinggi (Jao & Ho, 2019).

$$CONACC = \frac{(NI - DEP - CFO)}{TA} x - 1$$

Keterangan :

CONNAC : *Accounting conservatism* dengan *accrual measure*

NI : *Net income* (laba bersih)

DEP : Depresiasi *fixed assets*

CFO : *Cash from operation*

TA : Total assets

2.1.4 *Debt Covenant*

Debt covenant diartikan sebagai kontrak yang memproteksi kreditor terhadap tindakan berlebihan manajemen yang berlawanan dengan keinginan kreditor (Saputra *et al.*, 2016). *Debt covenant* membuat manajemen akan mendapatkan harta yang lebih banyak dari dana pinjaman yang diberikan oleh kreditor (Qorynilova, 2023). *Debt covenant* akan mencerminkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan (Aprilia, 2023). Kondisi hutang yang tinggi pada suatu perusahaan membuat kreditor memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengawasi secara ketat pengelolaan operasional dan kinerja perusahaan (Prawira & Mubarak, 2023). Kreditor akan memeriksa apakah perusahaan dapat memenuhi kewajibannya atau tidak (Arthasari & Dwiati, 2022). Hal tersebut tentu dilakukan untuk melindungi asetnya yang telah dipinjamkan kepada pihak perusahaan (Ibrahimi & Suryaputri, 2022). Sebab ketika perusahaan memiliki hutang yang semakin tinggi maka memungkinkan manajemen untuk melanggar perjanjian hutang tersebut (Priyono & Suhartini, 2022). Oleh karena itu, ketika perusahaan memiliki

hutang maka kreditur berhak untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan kegiatan operasionalnya (Darmayanti *et al.*, 2022).

Positive accounting theory menjelaskan bahwa ketika perusahaan berkemungkinan besar melanggar kontrak kesepakatan hutang maka perusahaan lebih condong untuk menggunakan prinsip akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan (Watts & Zimmerman, 1990). Pernyataan itu relevan dengan Jao & Ho (2019) yang mengungkapkan jika perusahaan berada pada kondisi yang gagal bayar maka perusahaan akan mengurangi biaya renegotiasi kontrak hutang melalui pemilihan prinsip akuntansi yang dinilai mampu meningkatkan laba. Maka dari itu, perusahaan yang mempunyai kontrak hutang biasanya lebih menginginkan prinsip akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (Sulastiningsih & Husna, 2017). Tindakan tersebut ditujukan untuk menjaga reputasi perusahaan di mata para kreditur agar mereka tetap percaya bahwa dana yang dipinjamkannya kepada perusahaan tetap aman (Manulu & Fiana, 2023). Dampaknya, laporan keuangan yang disajikan akan semakin jauh dari prinsip konservatif (Deslatu & Susanto, 2010).

Aurillya *et al.* (2021) menyebutkan jika *debt covenant* dapat diukur menggunakan *leverage*. Tingginya *leverage* pada suatu perusahaan mengindikasikan jika perusahaan tersebut kurang konservatif saat menyajikan laporan keuangan sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan laba (Deslatu & Susanto, 2010). Brilianti (2013) menyebutkan bahwa *leverage* bisa digambarkan sebagai berikut.

$$Leverage = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

Al-Slehat (2020) mengungkapkan bahwa *debt covenant* sendiri dapat diukur dengan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) yang digambarkan sebagai berikut.

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Capital}$$

2.1.5 *Litigation Risk*

Risiko yang menempel pada suatu entitas bisnis disebut dengan *litigation risk* yang menitikberatkan pada bahaya tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasakan perlakuan tidak adil dari entitas bisnis tersebut (Savitri, 2016). Maux & Francoeur (2014) juga menjelaskan bahwa *litigation risk* merupakan risiko yang timbul karena timbulnya gugatan hukum yang diajukan oleh para pihak yang merasa dicurangi sebab informasi yang disajikan tidak merefleksikan situasi perusahaan secara akurat. *Litigation risk* dapat datang dari kreditur maupun investor (Afriani *et al.*, 2021). Risiko litigasi dari pihak kreditur muncul ketika perusahaan melanggar kontrak perjanjian hutang karena tidak mampu melunasi kewajibannya, sedangkan risiko litigasi dari pihak investor muncul ketika kegiatan operasional yang perusahaan lakukan mengakibatkan kerugian untuk para investor dan mengancam investor (Dayyanah & Suryandari, 2019).

Risiko litigasi timbul karena investor dan kreditur sebagai pihak yang memiliki perlindungan hukum (Gunawan, 2022). Perlindungan terhadap kreditur dan investor dinilai penting karena adanya praktik penyalahgunaan kebijakan perusahaan yang sering dilakukan oleh manajemen (Anton *et al.*, 2022). Dalam *agency theory* dijelaskan bahwa *litigation risk* muncul dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang terjadi diantara *agent* dengan *principal* (Rahayu *et al.*, 2018). Hal tersebut diperjelas oleh Liu & Elayan (2015) yang menyatakan bahwa *litigation risk* meningkat seiring dengan tingkat asimetris informasi yang terjadi. Oleh karena itu, konflik kepentingan tersebut mendorong kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan meningkatkan laba perusahaan tanpa bisa dipertanggungjawabkan (Dewi & Rahayuningsih, 2023). Ketika perusahaan melakukan hal tersebut maka laporan keuangan yang disajikan tidak komprehensif sehingga kreditur dan investor memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan hukum terhadap perusahaan (Noviyanti & Agustina, 2021).

Litigation risk akan memunculkan *cost* yang cukup tinggi akibat berhadapan dengan hukum (Novitasari *et al.*, 2020). Secara rasional manajemen akan bertindak untuk menghindari biaya litigasi melalui penerapan *accounting conservatism* dalam menyajikan laporan keuangan (Mustikasari *et al.*, 2020). Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan mengalami *litigation risk* yang dipicu oleh penyajian laba secara *overstate* maka biaya litigasi yang dikeluarkan akan semakin besar, sehingga perusahaan akan mengimplementasikan *accounting conservatism* sebab keuntungan yang diperoleh melalui penerapan metode konservatif akan cenderung rendah (Rahayu *et al.*, 2018). Hal serupa diungkapkan oleh Hati (2011) yang menyatakan bahwa *accounting conservatism* digunakan untuk menyajikan nilai aset bersih lebih rendah di laporan keuangan dengan tujuan mengurangi *litigation risk*. Oleh karena itu, ancaman litigasi akan menimbulkan *understate* pada laporan keuangan yang disajikan (Hughes & Thakor, 1992). Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perusahaan terkena risiko ancaman litigasi maka perusahaan akan semakin menggunakan *accounting conservatism* dalam penyajian laporan keuangannya (Malenza *et al.*, 2021).

Nadila & Nursiam (2023) mengatakan jika rasio hutang terhadap ekuitas (DER) dapat dipakai untuk menghitung *litigation risk*. Sebab suatu entitas akan menghadapi risiko litigasi yang besar jika rasio hutang terhadap ekuitasnya (DER) tinggi. Agustina *et al.* (2016) menyebutkan jika rasio hutang terhadap ekuitas (DER) adalah sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

Paramita & Cahyati (2013) mengungkapkan bahwa risiko litigasi dapat diukur dengan menggunakan *assets growth*. Cooper *et al.* (2008) menyebutkan bahwa *asset growth* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Assets Growth} = \frac{\text{Total Assets } (t) - \text{Total Assets } (t - 1)}{\text{Total Assets } (t - 1)}$$

Sedangkan menurut Solikhah *et al.* (2018) menyatakan bahwa *litigation risk* yang disimbolkan dengan LITI dapat diukur dengan

menambahkan rasio likuiditas, *leverage* dan *firm size* yang akan dirumuskan sebagai berikut.

$$LITI = LIK + LEV + SIZE$$

Keterangan :

LIK = *Current Liabilities/Current Assets*

LEV = *Long Term Liabilities/Total Assets*

SIZE = $\ln(\text{Total Assets})$

2.1.6 *Political Cost*

Permatasari & Darmayanti (2021) mendefinisikan *political cost* sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai respon terhadap tuntutan yang berasal dari pihak luar seperti *government* dan ikatan buruh terhadap perusahaan. Ningsih *et al.* (2019) juga mengatakan hal yang serupa bahwa *political cost* merupakan segala pengeluaran yang dibebankan oleh pemerintah kepada suatu entitas bisnis sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa segala biaya (transfer kekayaan) yang dikeluarkan oleh suatu entitas sehubungan dengan aktivitas politik seperti pajak, peraturan, *antitrust*, tuntutan tenaga kerja, subsidi pemerintah, dan sebagainya dapat diartikan sebagai *political cost* (Dewata *et al.*, 2018).

Political cost sendiri berasal dari konflik kepentingan yang berlangsung diantara manajer perusahaan selaku pengelola dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan (Haerani & Riyadi, 2023). Disatu sisi perusahaan ingin meningkatkan laba yang dihasilkan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik para investor (Winanda & Astika, 2021). Disisi lain pemerintah selaku pembuat regulasi tentu akan bertindak untuk mengawasi perusahaan dengan ketat (Novitasari *et al.*, 2020). Hal tersebut tentu membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam mengungkapkan informasi pada saat menyajikan laporan keuangan (Fiorent, 2022). Sebab ketika suatu perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat tinggi dan berjangka panjang, maka pemerintah semakin termotivasi untuk meningkatkan pajak yang dikenakan dan menuntut

peningkatan pelayanan publik kepada perusahaan (Iskandar & Sparta, 2019). Oleh karena itu, benturan kepentingan yang terjalin diantara perusahaan dengan *government* tersebut akan melahirkan *political cost* (Oktomegah, 2012).

Boland & Godsell (2020) mengungkapkan bahwa *political cost* akan menggambarkan metode akuntansi yang dipilih oleh suatu perusahaan. Hal itu dikarenakan perusahaan tidak ingin menerima biaya-biaya yang ditanggung oleh pemerintah kepada perusahaan. Sebab *political cost* yang dikeluarkan perusahaan akan semakin meningkat jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar (Scott, 2003). Kevin & Sufiyati (2022) juga mengungkapkan jika makin tinggi aset maka makin tinggi juga *political cost* yang harus ditanggung. Dengan demikian, perusahaan semakin terdorong untuk menurunkan laba guna mengurangi *political cost* (Attia *et al.*, 2016). Watts & Zimmerman (1990) menyatakan bahwa dalam *positive accounting theory* telah disebutkan jika perusahaan akan cenderung memilih kebijakan untuk menanggung laba dengan tujuan memperkecil *political cost* yang ditanggung oleh perusahaan. Kebijakan penangguhan laba tersebut merupakan salah satu praktik *accounting conservatism* (Wiecandy & Khairunnisa, 2020). Oleh karena itu, ketika *political cost* yang ditanggung perusahaan tinggi maka implementasi *accounting conservatism* dalam penyajian laporan keuangan juga akan semakin tinggi (Rahayu *et al.*, 2018).

Oktomegah (2012) menyatakan bahwa *political cost* dapat diprosikan dengan ukuran perusahaan. Wiecandy & Khairunnisa (2020) menyebutkan jika ukuran perusahaan ialah sebuah skala yang bisa mengklasifikan besar dan kecilnya suatu perusahaan sehingga dapat mempresentasikan besarnya kekayaan yang ada pada suatu perusahaan serta bisa menjadi fokus bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi perusahaan (Wiecandy & Khairunnisa, 2020). Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$SIZE = Ln (Total Assets)$$

Deslalu & Susanto (2010) menyatakan bahwa *political cost* dapat dilihat melalui *net sales* yang dapat diukur melalui rumus berikut.

$$Net\ Sales = Ln (Net\ Sales)$$

Putri *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa *capital intensity* adalah salah satu parameter dari *political cost hypothesis* sebab suatu perusahaan dapat dikategorikan besar jika aset yang digunakan untuk aktivitas operasionalnya dalam rangka menghasilkan penjualan juga semakin besar. Alfian & Sabeni (2013) menjelaskan jika *government* memberikan pengawasan lebih banyak terhadap perusahaan-perusahaan yang tergolong besar sehingga perusahaan dengan modal yang padat akan menerapkan *accounting conservatism* untuk mengurangi *political cost* (Alfian & Sabeni, 2013). Purnama & Daljono (2013) mengatakan bahwa intensitas modal dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Intensitas\ Modal = \frac{Total\ Aset}{Total\ Penjualan}$$

2.1.7 *Financial Distress*

Ketika sebuah entitas bisnis mengalami kemerosotan finansial sebelum akhirnya dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi maka dapat dikatakan bahwa entitas bisnis tersebut mengalami *financial distress* (Andriani *et al.*, 2023). Kristina & Yuniarta (2021) juga menyatakan jika *financial distress* adalah sebuah pertanda menuju kebangkrutan dimana perusahaan menghadapi situasi finansial yang terus mengalami penurunan. *Financial distress* bermula ketika suatu entitas tidak mampu melunasi liabilitasnya, terutama *current liability* (Efendi & Handayani, 2021). Hal yang sama diungkapkan oleh Insani & Achyani (2023) yang mengatakan jika saat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban likuiditasnya termasuk tanggung jawab solvabilitas merupakan awal dari *financial distress*. Selain itu menurut Pertiwi *et al.* (2023) *financial distress* juga dapat dipicu ketika perusahaan tidak dapat membayar kewajiban tepat pada waktunya atau ketika kondisi kas perusahaan tidak menunjukkan bahwa perusahaan bisa segera melunasi kewajibannya.

Financial distress dapat mengancam semua perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar (Meilinda *et al.*, 2022). *Financial distress* jangka pendek mungkin hanya bersifat sementara namun akan menjadi lebih parah di masa depan (Syifa *et al.*, 2017). Oleh karena itu, *financial distress* merupakan sinyal yang mengancam keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Efendi & Handayani, 2021). *Financial distress* berdampak terhadap kondisi perusahaan yang membuat perusahaan membutuhkan dana tambahan untuk menjalani kegiatan operasionalnya dan membayar kewajibannya sehingga hal ini membuat hutang perusahaan akan semakin tinggi (Andriani *et al.*, 2023). Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan akan berimbas terhadap penurunan harga saham serta semakin berkurangnya investor (Kristina & Yuniarta, 2021). Dengan demikian, perusahaan akan lebih berhati-hati saat mengambil tindakan sebab *financial distress* akan berefek langsung terhadap kelanjutan eksistensi suatu perusahaan (Rahayu *et al.*, 2018).

Dalam penelitiannya, Kholifah *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa *financial distress* dapat diukur melalui beberapa cara yaitu :

1. Altman Z-Score Models

Altman Z-Score ialah salah satu model pengukuran *financial distress* yang dikemukakan pertama kali oleh Altman (1968).

Pengukuran *financial distress* dengan model ini terbagi menjadi :

a. Altman Z-Score Pertama

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 0,999 x_5$$

Keterangan :

Z : *Financial Distress* menggunakan Altman Z-Score

X₁ : Modal Kerja / Total Aset

X₂ : Laba Ditahan / Total Aset

X₃ : Penghasilan Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

X₄ : Nilai Buku Ekuitas / Total Utang

X₅ : Penjualan / Total Aset

Klasifikasi pada rumus ini yakni :

- 1) $Z < 1,8$ menunjukkan perusahaan bangkrut
 - 2) $1,8 < Z < 2,99$ menunjukkan perusahaan berada di *grey area*
 - 3) $Z > 2,9$ menunjukkan perusahaan dalam kondisi sehat
- b. Model Altman *Z-Score* Kedua (Revisi atas model pertama)

$$Z = 0,717 X_1 + 0,847 X_2 + 3,107 X_3 + 0,420 X_4 + 0,998 X_5$$

Klasifikasi pada rumus ini yakni :

- 1) $Z < 1,23$ menunjukkan perusahaan bangkrut
 - 2) $1,23 < Z < 2,90$ menunjukkan perusahaan berada di *grey area*
 - 3) $Z > 2,90$ menunjukkan perusahaan dalam kondisi sehat
- c. Model Altman *Z-Score Modified*

$$Z = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

Keterangan :

Z : *Financial Distress* menggunakan Altman *Z-Score*

X_1 : Modal Kerja / Total Aset

X_2 : Laba Ditahan / Total Aset

X_3 : Penghasilan Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

X_4 : Nilai Buku Ekuitas / Total Utang

Klasifikasi pada rumus ini yakni :

- 1) $Z < 1,1$ menunjukkan perusahaan bangkrut
 - 2) $1,1 < Z < 2,6$ menunjukkan perusahaan berada di *grey area*
 - 3) $Z > 2,6$ menunjukkan perusahaan dalam kondisi sehat
2. Springate *Models*

Springate *models* dicetuskan secara perdana pada tahun 1978. Pencetusnya sendiri ialah Gordon L.V. Springate. Model yang dikemukakan oleh Gordon tersebut menerapkan *Multi Discriminant Analysis* (MDA). Springate *models* digambarkan dengan rumus berikut.

$$S = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D$$

Keterangan :

S : *Financial Distress* menggunakan Springate *Models*

A : Modal Kerja / Total Aset

B : Penghasilan Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

C : Penghasilan Sebelum Pajak / Hutang Lancar

D : Penjualan / Total Aset

Klasifikasi pada model ini yakni :

$S < 0,862$ menunjukkan perusahaan dalam kategori bangkrut

$S > 0,862$ menunjukkan perusahaan dalam kategori sehat

3. Zmijewski Models

Zmijewski models pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Zmijewski dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$X - Score = -4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 - 0,004 X_3$$

Keterangan :

X – Score : *Financial Distress* menggunakan Zmijewski Models

X1 : *Return On Assets* (ROA)

X2 : Total Hutang / Total Aset

X3 : Aset Lancar / Hutang Lancar

Klasifikasi pada model ini yakni :

X-Score > 0 menunjukkan perusahaan berpotensi bangkrut

X-Score < 0 menunjukkan perusahaan tidak berpotensi bangkrut

4. Grover Models

Grover models pertama kali dipresentasikan pada tahun 2001 oleh Jeffrey S. Grover. *Grover models* dibuat oleh Jeffrey S. Grover dengan memodifikasi model pengukuran Altman *Z-Score* yang sebelumnya dikeluarkan oleh Altman di tahun 1968. (Pramesiti & Yuniningsih, 2023) menyebutkan bahwa pengukuran *Grover models* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$G = 1,650 X_1 + 3,404 X_2 + 0,016 X_3 + 0,057$$

Keterangan :

G : *Financial Distress* menggunakan *Grover Models*

X₁ : Modal Kerja / Total Aset

X₂ : Penghasilan Sebelum Bunga dan Pajak / Total Aset

X₃ : *Return on Assets Ratio* (ROA)

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Di bawah ini adalah beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai rujukan.

1. Dewi & Rahayuningsih (2023)

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Eksternal vs Mekanisme Internal Pada Konservatisme Akuntansi : Mana yang lebih efektif?” yang dilakukan di Indonesia. *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik dalam menentukan sampel sehingga diperoleh 211 sampel perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut juga menggunakan uji regresi linear berganda sebagai teknik analisis. Variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dengan menggunakan basis akrual sebagai pengukuran yang bersumber dari penelitian El-Habashy (2019). Variabel independen yang digunakan yaitu *litigation risk* dengan menggunakan pengukuran yang bersumber dari penelitian Solikhah *et al.* (2018), Kemudian *debt covenant* menggunakan rasio hutang terhadap aset (DAR) yang bersumber dari penelitian Solikhah *et al.* (2018). Selain itu juga terdapat *institutional ownership*, *leverage*, *managerial ownership*, *board size* dan *independent commissioners* sebagai variabel independen lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rahayuningsih (2023) ini menunjukkan bahwa *litigation risk* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Temuan itu mengindikasikan jika *litigation risk* tinggi maka implementasi konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan juga akan semakin tinggi. Hasil lainnya memperlihatkan jika *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut mengindikasikan jika *debt covenant* pada perusahaan dinilai tidak mampu mengurangi *conflict of interest* yang terjadi sehingga tidak mampu mempengaruhi manajer dalam mengimplementasikan konservatisme akuntansi dalam penyajian laporan keuangan.

2. Saputra *et al.* (2022)

Penelitian ini berjudul “*Conservatism in Accounting : Financial Distress, Tax and Litigation Risk*” yang dilakukan di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan mendapatkan hasil sebanyak 45 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji regresi data panel sendiri digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini yang diuji dengan bantuan *software* Eviews. Variabel dependen yang digunakan yaitu *accounting conservatism* dan variabel independen yang digunakan adalah *litigation risk*, *taxes* dan *financial distress*. Penelitian yang telah dijalankan oleh Saputra *et al.* (2022) menghasilkan temuan bahwa *litigation risk* tidak berpengaruh terhadap *accounting conservatism* yang mana berarti besar atau kecilnya risiko litigasi yang ditanggung perusahaan akibat adanya ancaman litigasi tidak akan mempengaruhi peningkatan *accounting conservatism* pada penyajian laporan keuangan perusahaan.

3. Novari *et al.* (2021)

Penelitian ini berjudul “*The Impact of Tax Incentives, Political Cost, Litigation Risk and Equity Valuation on Accounting Conservatism*” yang dilakukan di Indonesia. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sehingga menghasilkan 23 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Uji regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *accounting conservatism* dengan menggunakan *accrual measure* sebagai pengukuran. Variabel independen yang digunakan adalah *political cost* dengan *company size* sebagai pengukuran. Kemudian *litigation risk* menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) sebagai pengukuran. Kemudian terdapat pula variabel *tax incentive* yang menggunakan *Tax Retention Rate* (RTT) sebagai pengukuran serta variabel *equity valuation* yang menggunakan *Market to Book Value* (MBV). Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Novari *et al.* (2021) ini menunjukkan jika *political cost* dan *litigation risk* berpengaruh negatif signifikan terhadap *accounting conservatism*. Hal tersebut

mengindikasikan jika *political cost* dan *litigation risk* yang ditanggung perusahaan semakin besar maka tidak akan berdampak positif terhadap meningkatkan penerapan *accounting conservatism* saat menyajikan laporan keuangan.

4. Noviyanti & Agustina (2021)

Penelitian ini berjudul “*Factors Affecting Accounting Conservatism in Indonesia*”. Penggunaan *purposive sampling* sebagai teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menghasilkan 37 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji regresi linear berganda ditetapkan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS versi 22 dalam pengolahan data. Variabel dependen yang digunakan yakni *accounting conservatism* dengan menggunakan *book market ratio* yang terdapat di dalam penelitian Watts (2003). Variabel independen dalam penelitian ini yakni *litigation risk* dengan menggunakan *assets growth* sebagai pengukuran yang terdapat di dalam penelitian Agustina *et al.* (2016). Kemudian variabel independen lainnya yaitu *managerial ownership*, *institutional ownership*, *independent commissioners*, *leverage*, *liquidity* dan *growth opportunity*. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Agustina (2021) ini menunjukkan bahwa *litigation risk* tidak memiliki pengaruh terhadap *accounting conservatism* dan tentunya hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang ada di Indonesia tidak akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

5. Tamur (2021)

Penelitian ini berjudul “*The Effect of Institutional Ownership, Debt Covenant and Growth Opportunity on Accounting Conservatism*” yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dalam penelitian. Kemudian *purposive sampling* ditetapkan sebagai teknik dalam mengumpulkan sampel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa uji regresi linear berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah *accounting conservatism*. Kemudian variabel independen yang terdapat pada penelitian ini yaitu *institutional*

ownership, *debt covenant* dan *growth opportunity*. Penelitian yang dilakukan oleh Tamur (2021) ini menunjukkan jika *debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *accounting conservatism*. Hal tersebut mengindikasikan jika tingginya *debt covenant* akan berdampak terhadap peningkatan prinsip konservatif pada suatu perusahaan.

6. Zulfiati & Lusiana (2020)

Penelitian ini berjudul “*Debt Covenant, Managerial Ownership and Accounting Conservatism*” yang dilakukan di Indonesia. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga dapat diperoleh 112 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan bantuan *software* Eviews versi 10 dalam pengolahan datanya dengan menggunakan uji regresi data panel sebagai teknik analisis data. Variabel dependen yang terdapat pada penelitian ini adalah *accounting conservatism* dengan menggunakan *accrual measure* sebagai pengukuran. Kemudian variabel independen yang digunakan yakni *debt covenant* dengan menggunakan proksi *leverage* sebagai pengukuran. Kemudian variabel independen lainnya yaitu *managerial ownership* diukur dengan membagi total saham yang pegang oleh manajerial dengan keseluruhan total saham perusahaan yang beredar. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa *firm size* dan *sales growth*. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiati & Lusiana (2020) ini menunjukkan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *accounting conservatism*. Hal tersebut menyiratkan bahwa semakin tinggi hutang (*debt covenant*) maka akan meningkatkan *accounting conservatism*.

7. Sholikhah & Suryani (2020)

Penelitian ini berjudul “*The Influence of the Financial Distress, Conflict of Interest and Litigation Risk on Accounting Conservatism*”. Data pada penelitian ini berasal dari 20 laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur. Kemudian uji regresi data panel digunakan dalam penelitian ini sebagai teknik analisis datanya. Variabel terikat pada penelitian yakni *accounting conservatism* dengan menggunakan *accrual measure* yang

terdapat pada penelitian Zhang (2008). Variabel bebas dalam penelitian yakni *litigation risk* dengan menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas (DER) sebagai pengukuran. Kemudian Altman *Z-Score* digunakan sebagai pengukuran untuk variabel *financial distress*. Selain itu variabel independen lainnya adalah *conflict of interest*. Selanjutnya, *company size* digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah & Suryani (2020) ini menghasilkan temuan bahwa *litigation risk* berpengaruh positif serta signifikan terhadap *accounting conservatism* yang berarti tingginya *litigation risk* akan meningkatkan *accounting conservatism*.

8. Wiecandy & Khairunnisa (2020)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesulitan Keuangan, Risiko Litigasi dan Political Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi”. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 10 sampel perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data berupa uji regresi data panel dengan bantuan *software* Eviews versi 10. Variabel dependen pada penelitian ini yakni konservatisme akuntansi dengan menggunakan *accrual measure* sebagai pengukuran yang terdapat dalam penelitian Zhang (2008). Variabel independen dalam penelitian ini yakni kesulitan keuangan dengan menggunakan Altman *Z-Score* sebagai pengukuran. Kemudian risiko litigasi diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Variabel independen yang terakhir yaitu *political cost* diukur dengan menggunakan *company size*. Penelitian yang dilakukan oleh Wiecandy & Khairunnisa (2020) ini menunjukkan bahwa *political cost* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan *litigation risk* tidak memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

9. Dayyanah & Suryandari (2019)

Penelitian ini berjudul “Determinan Konservatisme Akuntansi Perusahaan : Peran Moderasi Financial Distress”. Dimana teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini yakni teknik *purposive sampling*

sehingga diperoleh 30 sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini digunakan teknik analisis berupa uji regresi linear berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 23. Variabel terikat yang digunakan yakni konservatisme akuntansi, Pengukurannya sendiri menggunakan *market to book ratio* yang terdapat di dalam penelitian Agustina *et al.* (2016). Kemudian variabel bebas pada penelitian ini yakni risiko litigasi. Pengukurannya sendiri menggunakan *asset growth* yang terdapat di dalam penelitian Paramita & Cahyati (2013). Kemudian variabel independen lainnya adalah *leverage* dan konflik kepentingan. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu *financial distress* diukur melalui pengukuran Altman *Z-Score models* yang terdapat dalam penelitian Risdiyani & Kusmuriyanto (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Dayyanah & Suryandari (2019) memperoleh temuan bahwa risiko litigasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang mengindikasikan bahwa peningkatan risiko litigasi membuat perusahaan akan berupaya untuk mencegah ancaman litigasi dengan menerapkan konservatisme akuntansi. Dalam penelitian ini *financial distress* memperlemah hubungan yang terjadi diantara risiko litigasi dengan konservatisme akuntansi yang menggambarkan ketika perusahaan mempunyai risiko litigasi yang tinggi serta dihadapkan dengan kesulitan keuangan maka manajer perusahaan semakin terdorong untuk menyajikan laporan keuangan secara tidak konservatif.

10. Rahayu *et al.* (2018)

Penelitian ini berjudul “*Factors Influencing the Application of Accounting Conservatism*” yang dilakukan di Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian yakni *purposive sampling* sehingga dihasilkan 32 sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Uji regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS 21. Variabel terikat pada penelitian ini adalah *accounting conservatism* dengan menggunakan rumus *market to book ratio* yang bersumber pada penelitian Risdiyani & Kusmuriyanto (2015). Kemudian variabel bebas yang

digunakan yaitu *litigation risk* dengan menggunakan Rogers & Stolken *models* sebagai pengukuran. Kemudian *political cost* dengan menggunakan *company size* sebagai pengukuran yang bersumber dari penelitian Reskino & Vemiliyarni (2014). Selain itu terdapat pula *leverage*, *financial distress* dan *company growth* yang digunakan sebagai variabel bebas lainnya.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rahayu *et al.* (2018) ini menunjukkan jika *litigation risk* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *accounting conservatism*. Hal ini berarti ketika *litigation risk* pada suatu perusahaan meningkat maka akan mengindikasikan peningkatan terhadap implementasi *accounting conservatism*. Kemudian pada penelitian ini *political cost* tidak memiliki pengaruh terhadap *accounting conservatism* yang berarti implementasi *accounting conservatism* pada suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh *political cost* yang ditanggung oleh suatu.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat Uji	Variabel	Hasil/Kesimpulan
1	Dewi & Rahayuningsih (2023)	• Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020	Litigation Risk	Signifikan (+)
			Debt Covenant	Tidak Signifikan
			Leverage	Signifikan (+)
			Institutional Ownership	Tidak Signifikan
			Board Size	Signifikan (-)
			Independent Commissioners	Tidak Signifikan
2	Saputra <i>et al.</i> (2022)	• Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020	Financial Distress	Signifikan (+)
			Litigation Risk	Tidak Signifikan
		• Regresi data panel	Tax	Signifikan (-)

3	Novari <i>et al.</i> (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2020 	Tax Incentives	Signifikan (+)
			Political Cost	Signifikan (-)
4	Noviyanti & Agustina (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017 	Managerial Ownership	Tidak Signifikan
			Institutional Ownership	Signifikan (-)
5	Tamur (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018 	Independent Commissioners	Signifikan (+)
			Leverage	Tidak Signifikan
6	Zulfiati & Lusiana (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018 	Liquidity	Tidak Signifikan
			Growth Opportunity	Tidak Signifikan
3	Novari <i>et al.</i> (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Regresi linear berganda 	Litigation Risk	Signifikan (-)
			Equity Valuation	Signifikan (+)
4	Noviyanti & Agustina (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Regresi linear berganda 	Litigation Risk	Tidak Signifikan
			Growth Opportunity	Signifikan (+)
5	Tamur (2021)	<ul style="list-style-type: none"> Regresi linear berganda 	Debt Covenant	Signifikan (+)
			Growth Opportunity	Signifikan (+)
6	Zulfiati & Lusiana (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Regresi data panel 	Debt Covenant	Signifikan (+)
			Managerial Ownership	Tidak Signifikan

7	Sholikhah & Suryani (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016 – 2017 	Financial Distress	Signifikan (-)
			Conflict of Interest	Tidak Signifikan
		<ul style="list-style-type: none"> Regresi data panel 	Litigation Risk	Signifikan (+)
8	Wiecandy & Khairunnisa (2020)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018 	Financial Distress	Tidak Signifikan
			Litigation Risk	Tidak Signifikan
		<ul style="list-style-type: none"> Regresi data panel 	Political Cost	Signifikan (-)
9	Dayyanah & Suryandari (2019)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017 	Leverage	Signifikan (+)
			Conflict of Interest	Tidak Signifikan
		<ul style="list-style-type: none"> Regresi linear berganda 	Litigation Risk	Signifikan (+)
10	Rahayu <i>et al.</i> (2018)	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2016 	Leverage	Signifikan (+)
			Litigation Risk	Signifikan (+)
			Financial Distress	Signifikan (+)
		<ul style="list-style-type: none"> Regresi linear berganda 	Political Cost	Tidak Signifikan
			Company Growth	Signifikan (+)

Sumber : Data hasil olah peneliti (2023)

2.3 Model Penelitian

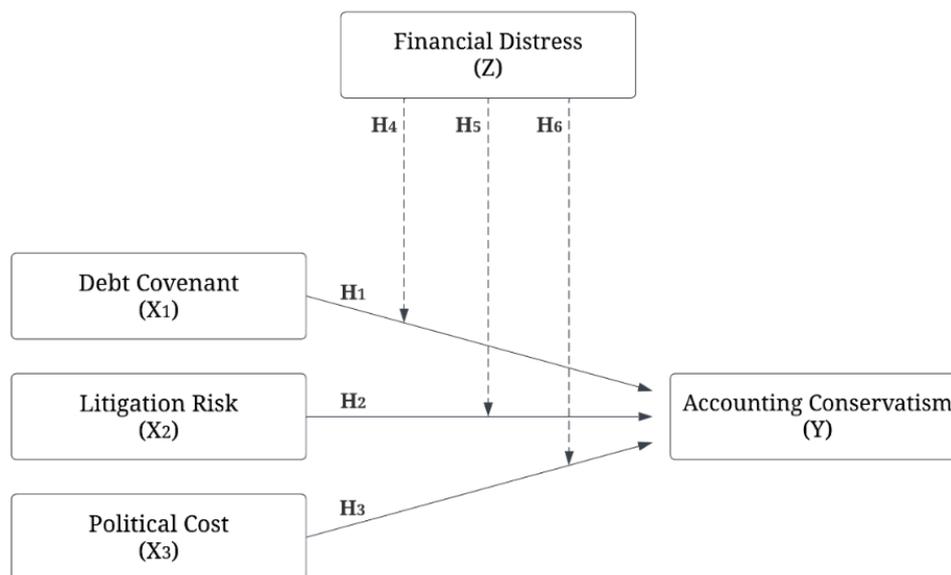
Accounting conservatism dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. Kemudian variabel independennya meliputi *debt covenant*, *litigation risk* dan *political cost*. Peneliti juga memakai *financial distress*

Allan Ramadhan, 2024

FAKTOR EKSTERNAL : DAMPAK TERHADAP IMPLEMENTASI KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.ac.id]

sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk melihat apakah *financial distress* mampu memoderasi hubungan antara *debt covenant*, *litigation risk* dan *political cost* terhadap *accounting conservatism*. Berdasarkan penjelasan di atas maka gambaran model penelitian akan disajikan sebagai berikut.



Sumber : Hasil olah peneliti (2023)

Gambar 1. Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Accounting Conservatism*

Debt covenant pada suatu perusahaan menunjukkan jika perusahaan tersebut mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari dana pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Qorynilova, 2023). Ketika *debt covenant* pada suatu perusahaan bertambah tinggi maka hutang perusahaan juga akan semakin tinggi (Aprilia, 2023). Di dalam *positive accounting theory* dijelaskan bahwa suatu perusahaan yang berkemungkinan melanggar kontrak hutang biasanya akan menggunakan prinsip akuntansi dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan (Watts & Zimmerman, 1990). Hal ini tentunya membuat laporan keuangan yang disajikan akan semakin jauh dari prinsip konservatif (Deslatu & Susanto, 2010).

Sulastiningsih & Husna (2017) menjelaskan jika perusahaan yang memiliki *debt covenant* cenderung mengaplikasikan prinsip akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip *accounting conservatism*, sehingga membuat laporan keuangan yang disajikan menjadi kurang konservatif (Yanti *et al.*, 2022). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan jika saat perusahaan memiliki *debt covenant* maka laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak konservatif. Hal ini didukung melalui penelitian yang telah dilaksanakan oleh Manulu & Fiana (2023) dan Nuraeni & Tama (2019) yang menjelaskan jika *debt covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap *accounting conservatism*. Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H₁ : *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *accounting conservatism*

2.4.2 Pengaruh *Litigation Risk* terhadap *Accounting Conservatism*

Litigation risk ialah risiko akibat tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan karena informasi keuangan yang disajikan tidak merefleksikan situasi perusahaan yang sebenarnya (Maux & Francoeur, 2014). *Agency theory* menyebutkan bahwa *litigation risk* tersebut dapat muncul karena adanya konflik kepentingan (Rahayu *et al.*, 2018). Hal tersebut timbul karena manajemen perusahaan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan (Ramli & Joe, 2019). Tindakan itu tentu berdampak terhadap laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak komprehensif sehingga membuat investor dan kreditur terdorong untuk melakukan tuntutan hukum kepada perusahaan (Noviyanti & Agustina, 2021). Novitasari *et al.* (2020) menyebutkan bahwa *litigation risk* membuat perusahaan harus menanggung banyak biaya karena berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu Watts (2003) menyatakan bahwa manajer pada suatu perusahaan akan termotivasi menurunkan biaya litigasi dengan mengimplementasikan *accounting conservatism*. Mustikasari *et al.* (2020) menyatakan hal yang sama dimana perusahaan akan berusaha untuk

menghindari *litigation risk* dengan menerapkan *accounting conservatism* dalam menyajikan laporan keuangan. Penjelasan tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Dewi & Rahayuningsih (2023), Sholikhah & Suryani (2020) dan Dayyanah & Suryandari (2019) yang menyatakan jika *litigation risk* memiliki pengaruh signifikan terhadap *accounting conservatism*. Sehingga hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : *Litigation risk* berpengaruh signifikan terhadap *accounting conservatism*

2.4.3 Pengaruh *Political Cost* terhadap *Accounting Conservatism*

Political cost adalah biaya-biaya yang dikenakan oleh pemerintah kepada suatu entitas bisnis sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku (Ningsih *et al.*, 2019). Oktomegah (2012) menyebutkan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diantara perusahaan dan *government* selaku perpanjangan tangan masyarakat akan menimbulkan *political cost*. Ketika perusahaan memiliki keuntungan yang besar dan konsisten maka *government* berwenang untuk meminta pajak yang lebih tinggi dan pelayanan publik yang lebih baik (Iskandar & Sparta, 2019). Oleh karena itu, perusahaan berupaya meminimalisir pajak yang ditanggung dengan mempresentasikan keuntungan yang lebih kecil melalui pengimplementasian *accounting conservatism* (Rahayu *et al.*, 2018). Hal tersebut sejalan dengan *positive accounting theory* yang menyebutkan jika perusahaan akan memperkecil *political cost* yang ditanggung dengan menggunakan metode akuntansi yang dapat menanggukhan laba yang dihasilkan perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990). Sebab tingginya keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berimbas terhadap peningkatan *political cost* yang ditanggung (Watts, 2003). Maka dari itu, perusahaan akan berupaya untuk memperkecil *political cost* dengan mengimplementasikan *accounting conservatism* (Sulastiningsih & Husna, 2017). Pernyataan ini diperkuat oleh riset yang sebelumnya dijalankan oleh Novari *et al.* (2021) dan Wiecandy & Khairunnisa (2020) yang mengatakan jika *political cost* memiliki

pengaruh terhadap *accounting conservatism*. Adapun hipotesis berdasarkan serangkaian penjelasan di atas adalah :

H₃ : *Political cost* berpengaruh signifikan terhadap *accounting conservatism*

2.4.4 *Financial Distress* memoderasi Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Accounting Conservatism*

Watts & Zimmerman (1990) menjelaskan bahwa di dalam *positive accounting theory* telah disebutkan jika perusahaan berkemungkinan besar untuk melanggar kontrak hutang cenderung memakai prinsip akuntansi yang mampu memperbesar keuntungan. Hal ini berkebalikan dengan prinsip *accounting conservatism*, dampaknya laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan menjadi tidak konservatif (Yanti *et al.*, 2022). Aprilia (2023) mengungkapkan jika *debt covenant* mampu merefleksikan tingkat hutang pada suatu perusahaan yang berarti *debt covenant* yang semakin tinggi akan mengindikasikan hutang yang semakin tinggi pula. Kondisi hutang yang semakin tinggi pada suatu perusahaan membuat perusahaan tersebut semakin tidak konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya (Widhiastuti & Rahayu, 2022)

Financial distress diartikan sebagai kondisi ketika perusahaan mengalami penurunan keuangan sebelum akhirnya bangkrut atau dilikuidasi (Zulni & Taqwa, 2023). *Financial distress* ini dipicu ketika perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban likuiditas dan solvabilitasnya (Insani & Achyani, 2023). Ketika perusahaan mengalami *financial distress* maka perusahaan tersebut akan membutuhkan dana tambahan untuk menjalani kegiatan operasional dan membayar kewajibannya sehingga membuat hutang perusahaan semakin tinggi (Andriani *et al.*, 2023). Hal ini tentunya berdampak terhadap peningkatan *debt covenant*, sebab tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat direfleksikan oleh *debt covenant* (Aprilia, 2023). Dengan demikian, kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress* ditambah dengan tingkat hutang (*debt covenant*) yang semakin tinggi

maka akan membuat perusahaan semakin jauh dari prinsip *accounting conservatism* atau semakin tidak konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya. Maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berperan dalam memperkuat hubungan yang terdapat pada *debt covenant* dengan *accounting conservatism*. Adapun hipotesis yang digunakan berdasarkan serangkaian penjelasan tersebut yaitu :

H₄ : *Financial distress* memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap *accounting conservatism*

2.4.5 *Financial Distress* memoderasi Pengaruh *Litigation Risk* terhadap *Accounting Conservatism*

Rahayu *et al.* (2018) menegaskan bahwa pada *agency theory* telah dijelaskan jika konflik kepentingan yang terjadi diantara manajer dengan investor akan memicu timbulnya *litigation risk*. *Litigation risk* sendiri akan membuat perusahaan menanggung banyak biaya sebab perusahaan berhadapan dengan hukum (Novitasari *et al.*, 2020). Maka dari itu, perusahaan akan berupaya untuk menurunkan *litigation risk* dengan mengimplementasikan *accounting conservatism* (Watts, 2003).

Efendi & Handayani (2021) menyebutkan bahwa *financial distress* merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Kondisi perusahaan yang buruk akibat mengalami *financial distress* akan memicu peningkatan terhadap *litigation risk* apabila perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan (Rahmi & Baroroh, 2022). Maka dari itu, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, *litigation risk* yang tinggi pada perusahaan dapat diperkecil dengan mengimplementasikan *accounting conservatism* (Sulastri & Anna, 2018). Dengan demikian, pada saat *financial distress* melanda suatu perusahaan serta *litigation risk* yang ditanggung perusahaan itu tinggi maka perusahaan akan semakin terdorong untuk mengimplementasikan *accounting conservatism*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* memperkuat hubungan diantara

litigation risk dengan *accounting conservatism*. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, hipotesis yang peneliti ajukan yaitu :

H₅ : *Financial distress* memperkuat pengaruh *litigation risk* terhadap *accounting conservatism*

2.4.6 *Financial Distress* memoderasi Pengaruh *Political Cost* terhadap *Accounting Conservatism*

Ningsih *et al.* (2019) menyebutkan jika *political cost* merupakan segala macam biaya yang dibebankan oleh *government* kepada suatu entitas bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Political cost* yang harus ditanggung oleh perusahaan kian meningkat ketika keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan juga meningkat (Scott, 2003). Watts & Zimmerman (1990) menyatakan jika pada *positive accounting theory* telah dijelaskan bahwa perusahaan akan berupaya untuk memperkecil *political cost* yang ditanggung dengan memilih prinsip akuntansi yang mampu mengecilkan laba. Maka *political cost* yang tinggi akan meningkatkan implementasi *accounting conservatism* pada suatu perusahaan (Rahayu *et al.*, 2018).

Sebuah perusahaan akan dengan hati-hati memprediksi perekonomian masa depannya ketika perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan dan risiko kebangkrutan (Zulni & Taqwa, 2023). Dengan demikian, saat perusahaan menghadapi kesulitan keuangan maka manajer senantiasa lebih berhati-hati ketika membuat keputusan sebab akan berimbas terhadap masa depan perusahaan (Rahayu *et al.*, 2018). Kristina & Yuniarta (2021) menyebutkan bahwa *financial distress* mendorong penerapan *accounting conservatism* melalui penyajian pendapatan pada laporan keuangan dengan lebih rendah. Dalam *positive accounting theory* disebutkan bahwa penyajian laba yang *understatement* tersebut akan mengurangi *political cost* yang ditanggung perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990). Maka ketika perusahaan berada pada kondisi *financial distress* serta *political cost* yang ditanggung perusahaan juga rendah mengindikasikan bahwa implementasi *accounting*

conservatism pada perusahaan tersebut semakin tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* memperkuat hubungan diantara *political cost* dengan *accounting conservatism*. Adapun hipotesis pada penelitian ini yakni :

H₆ : *Financial distress* memperkuat pengaruh *political cost* terhadap *accounting conservatism*